

SUATU SOROTAN LAIN TERHADAP “COUP” 1965*

Harold Crouch

Staf Pengajar di Monash University,
Meulbern, Australia. Penulis Buku
Militer dan Politik di Indonesia,
Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Pernah Mengajar di UI
antara tahun 1968-1971.

Pagi hari menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965, enam jenderal termasuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral A. Yani diseret dan dibunuh di Pangkalan Udara Halim tak jauh dari pusat kota Jakarta. Pada saat yang sama, sejumlah pasukan tak dikenal mengambil posisi di sekitar Lapangan Merdeka—yang memungkinkan mereka bisa mengontrol kediaman (istana) presiden Soekarno— dan menguasai fasilitas pusat-pusat telekomunikasi dan stasiun RRI. Suatu pengumuman dari siaran radio menyatakan bahwa “Gerakan

30 September yang di pimpin Let. Kol Untung telah menangkap orang-orang anggota (pimpinan) yang disebut sebagai “Dewan Jendral”, suatu komplotan — disponsori CIA— yang merencanakan untuk melancarkan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Di Jawa Tengah, suatu “coup” yang sama juga tengah dilakukan terhadap Brig. Jendral Surjosumpeno, Komandan Angkatan Darat Divisi Diponegoro.

“Usaha-usaha coup” di Jakarta gagal dan hanya berlanjut sampai sore tanggal 1 Oktober 1965. Presiden Soekarno walau sudah berada di Pangkalan Udara Halim menolak untuk melibatkan dirinya dalam gerakan pasukan pemberontak tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, Mayor Jendral Soeharto memobilisasi pasukannya untuk mengambil kembali Lapangan Halim. Pada hitungan waktu, pasukan Soeharto mulai bergerak untuk mengambil alih, hari itu Presiden Soekarno, Untung dan kelompoknya, ketua CC PKI D.N. Aidit meninggalkan Lapangan Halim. Setelah pasukan pemberontak melemah, Pangkalan Halim dikuasai dengan begitu singkat oleh pasukan Soeharto pada tanggal 2 Oktober 1965. Di Jawa Tengah, pada tanggal yang

*Diterjemahkan oleh A.S. Burhan dari naskah aslinya yang berjudul “Another Look At Indonesian ‘Coup’, *Indonesia*, No. 15 (Tahun 1973) hlm. 1-20.

sama Brig. Jendral Suryosumpeno bisa menempati markasnya kembali di Semarang; walau kemudian setelah tiga minggu, saat penguatan pasukan elit dari Jakarta tiba, kendalinya atas divisi Diponegoro berangsur-angsur melemah. Pasukan-pasukan dari Jakarta ini bukan hanya menempatkan kembali kendali kuasa Suryosumpeno namun juga melakukan pembunuhan massal yang menyingkirkan (mengeliminasi) PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Apakah "Gerakan 30 September" itu? Sampai saat paper ini ditulis ada tiga interpretasi yang dikemukakan. Pertama, sebagaimana diklaim kemudian, ia merupakan suatu gerakan kalangan perwira militer yang tidak puas dengan kepemimpinan Angkatan Darat. Kedua, suatu gerakan yang dinyatakan dari tentara orang-orang Indonesia yang keseluruhan operasinya diotaki PKI (Partai Komunis Indonesia). Dan ketiga, suatu gerakan yang diinterpretasikan sebagai suatu komplotan (partnership) antara perwira pembelot (dissident) dengan pemimpin-pemimpin PKI.

Sejak awal, dikaitkannya PKI dengan usaha-usaha coup didasarkan pada sejumlah alasan dan keberadannya. Ditunjuk misalnya dengan kehadiran Aidit pada tanggal 1 Oktober di Pangkalan Halim. Dan bahwa organ massa PKI seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Pemuda Rakyat berada di tempat itu

pada saat pembunuhan dan penyiksaan beberapa jendral itu. Lewat berbagai mobilisasi massanya PKI juga memberikan dukungan kepada "Gerakan 30 September." Di Jawa Tengah, PKI Solo mengeluarkan satu statemen yang mendukung Gerakan Untung. Di Yogyakarta, pada tanggal 2 Oktober suatu demonstrasi diorganisir oleh PKI setempat, dan sementara di Jakarta, Harian Rakyat, surat kabar milik PKI menurunkan editorial yang memuji langkah Untung. Indikasi awal dukungan dan keterlibatan PKI ini berlanjut dengan "pengakuan" anggota Politbiro Nyono —yang dipublikasikan pada awal Desember dan juga dari "pengakuan" Aidit—yang menurut dugaan banyak orang—digali dari hasil introgasi sebelum ia ditembak, yang muncul di Pers Jepang (Asahi Simbun-pen) pada bulan Pebruari 1966. Keduanya, dalam 'pengakuan' itu mengemukakan bahwa PKI memainkan peranan penting dalam usaha-usaha coup. Di atas bukti-bukti yang semacam inilah semula munculnya interpretasi dari Angkatan Darat mengenai keterlibatan PKI tersebut dibangun.

Sarjana Indonesianist dari Universitas Cornell Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey pada Januari 1966 melansir paper yang tidak dipublikasikan (lebih dikenal sebagai Cornell Paper). Dalam papernya ini mereka mencoba mengemukakan suatu hipotesa yang berbeda, dengan mencocokkan kembali semua

¹"Cornell Paper" ini diterbitkan pada tahun 1971, awalnya didistribusikan secara terbatas dalam bentuk seperti yang ada pada Benedict Anderson dan Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project).

data yang ada pada waktu itu.¹ Usaha-usaha coup dalam analisa mereka merupakan perkara internal Angkatan Darat. Kolonel-kolonel dari Divisi AD Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan (*flesh-pot*) Jakarta. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada motif PKI untuk melibatkan ke dalam suatu usaha-usaha kudeta. Di bawah sistem yang ada, PKI selama itu mendapatkan keuntungan yang banyak, karena itu strategi terbaik PKI adalah memelihara status quo ketimbang meletakkan dirinya untuk mendukung coup. Keterlibatan PKI yang demikian tentu saja merupakan kecelakaan. Hipotesa mereka terhadap dibawanya Aidit ke Halim antara lain, pertama, untuk mencegah PKI mengeksplotasi perkembangan situasi yang sudah terjadi. Dan kedua, sebagai suatu cara membuat tekanan terhadap Presiden Soekarno untuk mendukung gerakan Gestapu. Pemanfatan massa Pemuda Rakyat dan Gerwani dimaksudkan untuk menambah kekuatan gerakan yang sangat kecil waktu itu sehingga pemimpin-pemimpin gerakan tersebut dibawah komando PKI di Jakarta. Namun karena

massa PKI ini merupakan bagian dari yang dilatih oleh pelaksanaan program Angkatan Udara dalam menyiapkan "angkatan ke lima,"² di sini PKI sesungguhnya bukanlah pelopor partisipasi mereka dalam gerakan itu, kecuali beberapa perwira Angkatan Udara. Munculnya editorial di *Harian Rakyat* dan apa yang dilakukan PKI di Jawa Tengah itu terpisah dan tidak bisa dianggap sebagai membuktikan atau apalagi mengindikasikan keterlibatan PKI dalam penculikan para jendral. Kepastian "pengakuan" Nyono (yang ia sendiri menarik kembali pernyataannya pada pengandilannya di bulan Februari 1966) sangat meragukan, misal dengan disebut sebagai keputusan yang berasal dari pertemuan Politbiro yang dihadiri oleh Aidit maupun Nyoto di bulan Juli. Karena hal itu memunculkan sejumlah ketidaktepatan yang mencolok, ketika pada kenyataannya kedua orang tersebut berada di luar negeri selama bulan-bulan itu, dan kebingungan pada penampakan Nyono sendiri yang dimasukkan sebagai anggota Politbiro. Karena itu untuk "pengakuan" Aidit yang muncul setelah Paper Cornell dipersiapkan, adalah jelas bahwa keotentikannya tak bisa diterima

¹Januari 1965, PKI mengusulkan pembentukan suatu "angkatan kelima". Angkatan ini merekrut kalangan sipil sebagai tambahan dari angkatan yang sudah ada, seperti angkatan darat, udara, laut dan kepolisian. Angkatan ke lima terdiri dari unsur buruh dan petani. Para pimpinan Angkatan Udara menyambut baik usulan ini, karena menurut mereka, hal tersebut akan memberikan pertimbangan bagi kekuatan Angkatan Darat.

²Beberapa sarjana mengambil "pengakuan" Aidit secara meyakinkan. Satu pengecualian dengan yang dilakukan Jhon Sutter, "Two Faces of Konfrontasi: 'Crush Malaysia' and Gestapu," *Asian Survey*, Vol VI, No. 10 (Oktober 1966), hlm. 535 dan 541. Angkatan Darat tidak mengajukan "pengakuan" ini sebagai bukti pada pengadilan Mahmillub.

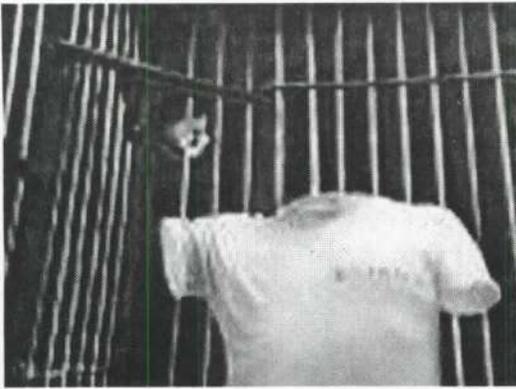
oleh penulis paper Cornell tersebut.³

Pandangan bahwa PKI tidak mengambil bagian dalam perencanaan usaha coup berubah dengan meyakinkan bersamaan jajaran penting pemimpin PKI yang muncul sebelum pengadilan Mahmillub diadakan untuk menekan banyak pandangan orang kearah dugaan bahwa PKI memang terlibat.⁴ Bukti-bukti persidangan ini tentu saja harus diperlakukan dengan hati-hati. Angkatan Darat yang berada di balik peradilan-peradilan tersebut telah menuduh PKI sebagai *dalang* di balik usaha-usaha coup dan tidak memberikan kepada jaksa maupun hakim pada upaya pengadilan ini suatu ruang selain pandangan keterlibatan PKI. Lebih jauh, banyak saksi-saksi yang diajukan tampak sekali adanya kemungkinan sudah disiapkan Angkatan Darat. Dan banyak juga pernyataan saksi—akibat mengalami penyiksaan selama interogasi sebelum persidangan—yang menyesatkan pengadilan. Walau demikian, adalah mudah untuk tidak memakai atau mengabaikan bukti-bukti dari pengadilan ini. Penga-

kuan penting memang telah dibuat baik dari tokoh-tokoh komunis maupun militer yang setidaknya mengindikasikan ada keterlibatan PKI.⁵ Secara khusus mengenai keterlibatan PKI itu, dengan satu cara atau cara lainnya, diakui misalnya pada kesaksian pemimpin-pemimpin PKI dalam hal ini dari anggota Politbiro seperti Sudisman dan Nyono atau seperti Paris Pardede—pernah menjadi kandidat anggota Politbiro—yang ini semua tampak semakin memperkuat tuduhan Angkatan Darat. *Toh*, “pengakuan” dari orang seperti Sudisman dan Nyono yang keterangannya cenderung diulang-ulang karena sudah dipersiapkan sebelumnya tetap tak bisa terlihat wajar diceritakan. Ini diindikasikan oleh seringnya mereka membuat pernyataan yang tidak dikehendaki di sidang pengadilan. Selain itu meski mereka mengakui tindakan-tindakan coup yang telah dituduhkan, mereka tetap menolak interpretasi yang dibuat oleh kejaksaan dan pengadilan-pengadilan tersebut. Mereka menolak bahwa coup merupakan usaha langsung melawan

⁴Presiden Soekarno memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengadakan suatu sidang pengadilan militer Mahmillub bagi mereka pelaku peristiwa 30 September 1965. Proceeding pengadilan ini secara lengkap baik itu untuk pengadilan Nyono, Untung dan Subandrio telah diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat. Untuk persidangan Omar Dhani, Sudisman, dan Utomo Ramelan, saya juga mempergunakannya dari rekaman proses lengkap dari pengadilan Mahmillub ini. Namun dalam kasus untuk transkrip pengadilan Supardjo, Syam dan Wirjomarto saya menyandarkan pada *summary* yang hampir terinci dari kesaksian yang diberikan mereka di sidang pengadilan. Banyak pengadilan yang sudah diadakan untuk tokoh-tokoh lain yang belum bisa saya jadikan sumber karena belum sempat saya periksa.

⁵Kesimpulan ini juga didukung oleh pernyataan kelompok pelarian PKI baik di Eropa maupun di tempat lain. Lihat Rex Mortimer, “Indonesia: Émigré Post-Mortem on the PKI”, *Australian Outlook*, Vol. XXII, No. 3 (Desember 1968), hlm. 347.



pemerintah dan menolak juga bahwa coup membenarkan tindakan gerakan 30 September yang mendasarkan di situ sungguh-sungguh ada "Dewan Jendral" yang merencanakan menjatuhkan Soekarno.

Begitulah ketika kesaksian dari pemimpin PKI setidaknya mengindikasikan PKI, tuduhan Angkatan Darat lalu menjadi jauh lebih dalam mengenai peran PKI. Menurut Angkatan Darat PKI adalah dalang licin yang menggerakkan, merancang, mengorganisir usaha-usaha coup.⁶ Tokoh kunci yang menghubungkan PKI dengan "gerakan 30 September" adalah ketua "Biro Khusus" PKI yang diketahui mempunyai banyak nama samaran, tetapi sering disebut dengan nama "Syam." Syam langsung berhubungan hanya dengan Aidit dan banyak pemimpin PKI tidak mengetahui aktivitas orang ini. Biro Khusus mempunyai fungsi

memelihara kontak dengan tentara yang dianggap bersimpati pada PKI. Saat Soekarno mengalami sakit tiba-tiba di bulan Agustus 1965 Aidit khawatir bahwa Soekarno mungkin meninggal atau tak mampu lagi memegang otoritas kekuasaannya, maka Aidit melihat bahwa keadaan seperti itu bisa menjadi peluang bagi militer bergerak mengkonsolidasikan posisinya untuk menyingkirkan PKI. Karena itu untuk mencegah hal tersebut terjadi, Aidit memerintahkan pada Syam untuk memobilisasi dukungan bagi PKI dari dalam tentara untuk mengambil tindakan terhadap kepemimpinan Angkatan Darat. Dengan demikian —menurut Angkatan Darat—PKI lah yang bertanggungjawab atas upaya-upaya coup. Para tentara yang terlibat dalam gerakan hanyalah semata alat dari PKI.

Banyak keraguan yang diperlihatkan versi Angkatan Darat yang mendasarkan ketidakmungkinan didalamnya ini. Adalah kuat untuk meyakini bahwa petinggi yang memegang posisi penting dalam militer bisa terkaburkan (manipulated) sedemikian mudah. Lebih jauh —sebagaimana dinyatakan Cornell Paper— juga mudah meyakini bahwa petinggi atau perwira ini mempunyai alasan sendiri bagi mereka selama ini untuk tidak puas terhadap kepemimpinan Angkatan Darat, tanpa memperhitungkan PKI. Dari sinilah

⁶Pandangan Tentara (Angkatan Darat) mengenai keterlibatan PKI yang paling lengkap bisa dilihat pada tulisan Nugroho Susanto dan Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the 'September 30' Movement in Indonesia* (Jakarta: Pembimbing Massa, 1968).

suatu interpretasi Gerakan 30 September ketiga menyatakan bahwa gerakan itu merupakan hasil kerjasama antara tentara pembangkang dengan para pemimpin PKI. Interpretasi ini nampaknya sangat mungkin bahwa tentara *desident* sudah sejak awal mulai merencanakan gerakan mereka menentang kepemimpinan Angkatan Darat sebelum kontak dibuat dengan PKI, atau kebalikannya, boleh jadi ada banyak atau sedikit kerjasama yang sama. Sebegitu jauh pendukung interpretasi ini membatasi diri mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa kemungkinan ini masih terbuka.⁷ Berikut ini saya akan menguji kesaksian yang muncul pada persidangan Mahmillub ke I yang — meskipun tujuan yang dibuat terutama membuktikan bahwa PKI merupakan dalang— dalam kenyataannya menunjukkan bahwa tokoh-tokoh militer mempunyai motif sendiri untuk turut serta dalam gerakan tersebut dan juga menunjukkan munculnya prakarsa awal dari dalam Angkatan Darat. Dari maksud pengadilan yang bisa dilihat, hal itu hanya bisa diharapkan bahwa bukti-bukti untuk interpretasi ini sangat masih terbuka. Tetapi hal ini bukan berarti tak meyakinkan. Pada waktu yang sama, bukti-bukti pengadilan ini secara banyak sekali yang mendukung pandangan bahwa PKI secara mendalam tidak terlibat.

Intrepretasi bahwa PKI terlibat secara sadar dalam perencanaan dan pengorganisasian coup mengundang keberatan-keberatan yang pokok. Pertama, semua pelaku gerakan yang tampak kasat mata adalah anggota prajurit Angkatan Bersenjata, terutama dari Angkatan Darat walau sebagian juga ada dari Angkatan Udara. Tidak ada anggota PKI yang nampak dimasukkan pada pemimpin coup. Jika PKI nyata-nyata memainkan peranan penting, mengapa PKI begitu tersembunyi secara mendalam, apakah yang dilakukan PKI sebenarnya? Kedua, terlepas dari adanya demonstrasi tanggal 2 Oktober 1965 yang dipelopori PKI di Yogyakarta, PKI begitu tampak menahan diri untuk memobilisasi dukungan massanya terhadap Gerakan Untung. Jika PKI terlibat mengapa PKI gagal memanfaatkan senjata yang paling ampuh (massanya yang banyak-pen) untuk mendukung gerakan? Ketiga, sebagaimana diperlihatkan Paper Cornell, PKI “sesungguhnya dalam posisi yang sangat baik dengan strategi jalan damainya.” Perkembangan politik ditahun 1964 dan tahun 1965 nampaknya sangat menguntungkan PKI, karena itu, mengapa ia mengambil resiko dengan menjadi pengerak awal dan mendukung gerakan yang bertujuan merusak keadaan yang begitu menguntungkan PKI itu?

Argumen bahwa PKI mengambil

⁷Misalnya bisa dilihat pada tulisan Donald Hindley, “Alirans and the Fall of the Old Order”, *Indonesia*, No. 9 (April 1970), hlm. 35 dan Rex Mortimer, “Unresolved Problems of the Indonesian Coup”, *Australian Outlook*, Vol. XXV, No. 1 (April 1971), hlm. 99.

bagian dalam perencanaan dan pemrakarsa usaha coup mendasarkan pada bukti-bukti yang muncul pada pengadilan Mahmillub tahun 1966, 1967, 1968 dan pengadilan berikutnya.⁸ Pemimpin-pemimpin PKI seperti Nyono, Sudisman, Paris Pardede dan Syam memperkuat bahwa partai ini sungguh-sungguh percaya bahwa memang ada rencana Dewan Jendral yang merencanakan akan mengambil alih kekuasaan ketika Soekarno wafat, atau bahwa ada Dewan Jendral yang akan menyingkirkan Soekarno sebelum ia meninggal. Mereka yakin bahwa semacam pengambilalihan itu akan menjadi malapetaka bagi PKI. Saat kesehatan presiden pada awal Agustus memberikan alasan kepada kemungkinan itu, PKI merasa semakin khawatir dan kondisinya menjadi genting. Jadi PKI memiliki alasan yang mendesak, sehingga ia ikut melakukan usaha-usaha coup. Tetapi PKI sebenarnya tidak mempunyai sumber kekuatan fisik untuk berhadapan dengan pemimpin tentara dalam suatu konfrontasi langsung. Jika kita mengabaikan

kesaksian Nyono, juga gambaran yang muncul dari kesaksian Sudisman, Paris Pardede dan Syam yang seperti itu, maka bisa dikatakan usaha coup merupakan bentuk "intrik internal dalam Angkatan Darat" yang di dalamnya perwira menengah pemberontak mengambil aksi menentang kepemimpinan utama Angkatan Darat. Peranan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan tersebut tetaplah meninggalkan hal yang tersembunyi, demikian juga organisasi-organisasi massa PKI yang tidak dimobilisir, sehingga kesan terbentuk bahwa PKI tidak terlibat. Dengan menyembunyikan peranannya, PKI mungkin berharap bahwa gerakan akan mendapatkan hasil kemenangan lebih mudah baik di dalam Angkatan Bersenjata maupun di mata publik politik secara umum. PKI dalam gerakan pada dasarnya bersifat defensif yang bertujuan untuk melindungi PKI dari "Dewan Jendral." Di sini tidak dapat dikatakan PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan.⁹

Bukti yang muncul di pengadilan Mahmillub oleh para pemimpin PKI secara

⁸Pandangan bahwa PKI tidak terlibat sedikit banyak hanya dapat dipertahankan oleh mereka yang mengabaikan semua bukti dari pengadilan Mahmillub. Sebagai contoh, meskipun kesaksian ada berpuluh-puluh dihasilkan dari Mahmillub, Leslie Palmier tahun 1971 menilai bahwa "Angkatan Darat telah berusaha sekuat-kuatnya dalam usaha mencari bahan bukti yang menjatuhkan tanggungjawab coup itu pada PKI meski kelihatannya hanya membuat suatu 'pengakuan' Aidit yang dibuatnya sebelum ditembak." Leslie Palmier, "30th September Movement in Indonesia", *Modern Asian Studies*, Volume 5, No. 1 (1971) hlm. 15.

⁹Guy Pauker dan Justus M. van der Kroef mengemukakan suatu interpretasi yang sifatnya "offensif" berkaitan dengan keterlibatan PKI. Sejak awal kedua penulis ini menyatakan bahwa PKI waktu itu tengah begitu berpengaruh pada pemerintahan Soekarno (uraian tentang ini misal pada tulisan Guy J. Pauker, "Indonesian in 1964: Toward a 'People's Democracy'?" *Asian Survey*, Vol. V, No. 2 (Perbruari 1965); Justus M. van der Kroef, "Indonesian Communism's 'Revolutionary Gymnastics'," *Asian Survey*, Vol. V, No. 5 (Mei 1965). Jadi sukar bagi kedua orang ini untuk mengatakan bahwa keikutsertaan PKI adalah

ra jelas memang menunjukkan keterlibatan PKI. Tuduhan ini ditunjukkan dengan adanya motif PKI, dan logisnya taktik menyembunyikan peran keterlibatan yang dimainkan PKI. Namun dari bukti yang ditunjukkan berbagai saksi pada berbagai pengadilan, tidak mengarah pada konklusi seperti yang dituduhkan, berkaitan dengan ciri dan luasnya keterlibatan yang dilakukan PKI. Bisa ditarik kesimpulan pada tiga interpretasi pokok dari bukti-bukti pengadilan yang diberikan tokoh penting komunis. Pertama, mendasarkan bukti pada versi Nyono. Nyono mengakui bahwa ia mendukung perwira pemberontak secara pribadi dan menyusun sejumlah daftar anggota organisasi masa PKI untuk ditraining sebagai kekuatan (pasukan) cadangan, tetapi ia menolak bahwa PKI sendiri sedikit banyak terlibat. Kedua, menurut Sudisman dan Pardede, pemimpin PKI telah mengambil keputusan untuk mendukung usaha coup tetapi mereka mengelak dengan mengatakan bahwa inisiatif gerakan justru datang dari "perwira progresif," bukan dari PKI. Ketiga, ketua

Biro Khusus, Syam memberikan bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa PKI telah merencanakan sejak awal gerakan coup dan bahwa perwira yang terlibat digerakkan oleh PKI. Jadi dari keterangan-keterangan tersebut nampaknya bisa ditentukan pada akhirnya banyak pemimpin PKI itu terlibat dalam usaha coup, namun sifat persis keterlibatannya masih mengundang interpretasi yang beragam.

Mahmillub diadakan yang pertama pada bulan Pebruari 1966 untuk menyidangkan Nyono. Nyono adalah anggota politbiro PKI dan ketua Komite Regional PKI Jakarta. Ia juga ketua SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Nyono ditangkap bersama-sama dengan kadernya pada tanggal 3 Oktober 1965 walau diketahuinya —bahwa itu dirinya— baru pertengahan Nopember ketika ia dengan ceroboh menggantikan nama samarnya dengan namanya. Setelah ketahuan, ia diintrograsi, dan "pengakuan" hasil intrograsi tersebut oleh Angkatan Darat dikumpulkan dan dipublikasikan secara luas pada awal bulan

bersifat "defensif." Pauker dalam hal ini 'cenderung meyakini bahwa Aidit memang saat itu mempersiapkan startegi offensivitasnya menghadapi kepemimpinan Angkatan Darat sebelum rumor mengenai "Dewan Jendral" menyebar pada akhir Mei 1965." Lihat Guy Pauker, *The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia* (Santa Monica: The RAND Corporation, 1969). Van der Kroef juga melihat usaha coup sebagai bagian dari "akselerasi puncak yang dimainkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, yang dimulai hampir pasti sejak dua tahunan sampai hari sebelum coup 30 September 1965." Van der Kroef, "Gestapu' in Indonesia," *Orbis*, Vol. X, No. 2 (Summer 1966), hal. 459. Walau demikian, dalam bukti-bukti pengadilan tidak ditemukan indikasi bahwa usaha-usaha coup sebagai puncak startegi offensivitas PKI dimulai sebelum Agustus 1965. Sebaliknya bukti-bukti pengadilan menunjukan sesuatu yang hampir nekat PKI mengambil strategi defensif pada keikutsertaannya dalam gerakan 30 September.

¹⁰ *Angkatan Bersendjata* (Djakarta), 3 Desember, 1965.

Desember.¹⁰ Dalam "pangakuannya" tersebut Nyono mengemukakan tentang keputusan Politbiro dalam menyokong rencana perwira progresif untuk menggagalkan rencana coup yang akan dilakukan oleh "Dewan Jendral". Ia juga menyatakan bahwa ia diberi tugas merekrut 2000 sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pembentukan pasukan cadangan sebagai dukungan terhadap gerakan perwira progresif tersebut. Tetapi selama penyidangan ia menarik kembali pengakuan itu. Ia mengatakan bahwa ada kondisi yang dibuat serta diarahkan dengan ancaman dan malapetaka yang bisa menyimpannya (komunis phobia) kepada para tahanan komunis yang ditetaskan secara terus menerus selama intrograsi.¹¹

Menurut keterangan Nyono dalam persidangannya, Politbiro PKI telah mengadakan tiga kali pertemuan pada bulan Agustus setelah Aidit kembali dari lawatan luar negerinya. Dalam pertemuan ini, ada tiga hal masalah dilontarkan Aidit. Hal pertama berkaitan dengan sakitnya presiden Soekarno yang dipandang merupakan soal yang sangat serius. Kedua informasi mengenai "Dewan Jendral" yang berencana melakukan coup; dan ketiga prakasa "perwira progresif" yang bermaksud mengambil tindakan preventif terhadap aksi "Dewan Jendral." Menurut

Nyono dalam pertemuan itu Aidit melontarkan soal apakah PKI lebih baik menyokong "perwira progresif" yang akan mengambil aksi pencegahan, atau melaporkan isu rencana Dewan Jendral itu kepada presiden yang dengan demikian menunggu sikap presiden. Pada akhir pertemuan yang diadakan 28 Agustus 1965, Aidit menegaskan bahwa pilihan kedualah yang diambil. Dengan demikian keputusan Politbiro adalah melaporkan kepada presiden mengenai masalah bahayanya rencana "Dewan Jendral" dengan harapan akan ada tindakan-tindakan pencegahan dari Presiden.¹²

Walaupun keputusan Politbiro PKI demikian, menurut Nyono, "perwira progresif" mengambil keputusan untuk tetap terus sesuai dengan rencananya,



¹¹Kesaksian Nyono pada persidangan Nyono. Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, 'Gerakan 30 September.' Dihadapan Mahmillub I. Perkara Nyono (Djakarta: n.p., 1966), hlm 59-60.

¹²Ibid., hlm. 33-37.

meski tak ada dukungan dari PKI. Pada awal September 1965, Nyono diminta perwira-perwira itu membantu gerakan mereka dengan merekrut paling tidak 2000 sukarelawan sipil yang akan bertindak sebagai pasukan cadangan. "Perwira progresif" tidak menemui Nyono secara langsung mengenai permintaan tersebut, melainkan melalui Sukanto, sekretaris umum Pemuda Rakyat. Sukanto ini sebelumnya memang telah mempunyai kontak dengan perwira progresif karena keikutsertaan Pemuda Rakyat pada rencana perekrutan warga sipil untuk dilatih menjadi relawan militer yang dikordinasi Angkatan Udara di Halim. Rencana Program pembentukan relawan militer dari warga sipil ini, pelaksanaannya di bawah tanggungjawab Mayor Sujono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim, yang juga merupakan salah satu anggota "perwira progresif." Sujono dalam kesaksiannya mengatakan pendahuluan latihan di Pangkalan Halim merupakan bagian tahapan untuk memperkuat pertahanan lokal sekitar pangkalan dan membuat kelompok inti untuk "angkatan kelima" seperti yang telah diusulkan. Latihan-latihan ini telah mulai sejak tanggal 5 Juli 1965. Dan sepanjang bulan Juli hingga Agustus telah diadakan empat latihan secara berkelanjutan dengan 200-300

peserta dalam setiap pelatihan yang lamanya sekitar satu sampai dua minggu. Hampir secara keseluruhan, peserta latihan tersebut direkrut dari organisasi massa PKI seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), SOBSI, dan Gerwani meski ada sebagian dari peserta yang juga berasal dari partai nasionalis kiri seperti Partindo (Partai Indonesia). Pada bulan September, dua kali lebih kursus diadakan dengan waktunya yang lebih pendek yang diikuti dengan jumlah peserta beberapa kali lebih banyak. Pada kursus paling akhir di bulan September, jumlah peserta mencapai 1200 untuk sekali latihan yang memakan waktu lima hari.¹³ Nyono mengakui dialah yang mengatur kenaikan jumlah peserta pada dua kursus terakhir itu. Langkah Nyono memberi dukungan pada perwira progresif ini diakui sebagai sikap pribadinya, meskipun ia tahu bahwa tindakannya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Politbiro.¹⁴

Di bulan September tanggal 28 sekitar 800 sukarelawan dikumpulkan lagi dalam satu kursus yang diadakan berkaitan dengan adanya "perkembangan dan informasi baru" (refresher course).¹⁵ Para peserta kursus diberitahu bahwa latihan dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi Nekolim¹⁶ yang berencana akan

¹³Kesaksian Sujono dalam pengadilan Nyono. *Ibid.*, hlm. 207-223.

¹⁴Kesaksian Nyono pada persidangan Nyono. *Ibid.*, hlm. 53 dan 79.

¹⁵Kesaksian Sujono pada pengadilan Untung. Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, 'Gerakan 30 September.' *Dihadapan Mahmillub II. Perkara Untung* (Djakarta: n.p., 1966), hlm. 114.

¹⁶Istilah yang dibuat Soekarno untuk menyebut kolonialis, neo-kolonialis dan imperialis.

melakukan invasi ke Indonesia. Para sukarelawan tersebut membentuk dirinya sebagai kekuatan cadangan dari "gerakan 30 September." Para sukarelawan ini ditempatkan di Lubang Buaya yang berada di dalam Pangkalan Halim tempat para jendral kemudian dibawa, dibunuh dan dikubur.

Karena itu, yang bisa disimpulkan dari penjelasan Nyono, PKI sebagai partai tidaklah terlibat dalam usaha-usaha coup. Politbiro memang mengetahui rencana aksi "perwira progresif" namun menolak keikutsertaannya dalam gerakan tersebut. Walau demikian, Nyono mengakui secara pribadi ia menyetujui rencana aksi perwira progresif dengan mempergunakan posisinya dalam merekrut orang-orang dari ormas PKI untuk dipersiapkan menjadi kekuatan tambahan "gerakan 30 September." Akan tetapi juga di sini, walau Nyono mengetahui tujuan untuk apa pembentukan kekuatan ini digunakan, para peserta kursus itu sendiri mengira bahwa kursus ditujukan untuk mempertahankan negara dari serangan Nekolim.

Meskipun dari apa yang disimpulkan Nyono konsisten dengan fakta-fakta yang telah diketahui banyak waktu itu, kebenaran yang menyangkut kejujurannya (veresitasnya) masih bisa diragukan. Hal ini mengingat sepanjang Pebruari 1966 tuduhan atas PKI sebagai melakukan coup menyebar begitu luas dan tekanan yang dialamatkan kepada Presiden Soekarno untuk turun dari kursi kepresidenan juga terasa begitu kuat. Karena itu, kondisi ini bisa dilihat sebagai pengam-

bilan tugas yang dilakukan Nyono untuk mengasumsikan tanggungjawabnya secara pribadi dalam menyokong elemen PKI pada usaha-usaha coup, agar supaya partainya bebas dari tuduhan. Bagian keterangan Nyono yang krusial itu adalah pernyataannya bahwa Politbiro menetapkan untuk tidak ikutserta dalam aktivitas-aktivitas "perwira progresif," namun melaporkan persoalan yang ada langsung kepada presiden. Tetapi sebaliknya Nyono juga mengakui bahwa Aidit begitu khawatir terhadap kemungkinan pengambilan kekuasaan "Dewan Jendral" berkaitan dengan sakitnya presiden yang makin memburuk. Bahkan lebih jauh ia mengakui bahwa Aidit telah memutuskan untuk melakukan kontak dengan perwira pemberontak yang hendak mengambil tindakan pencegahan terhadap "Dewan Jendral". Di samping itu juga mengakui bahwa ia sebagai anggota Politbiro telah bekerjasama dengan perwira pemberontak dalam merekrut sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pasukan cadangan. Nah konsisten dengan pernyataannya bahwa hal itu dilakukan sebagai inisiatif pribadi, toh semua pengakuannya pada akhirnya menyuratkan kemungkinan keterlibatan PKI lebih dalam dan jauh dari sekedar yang hendak dilakukannya melalui pengakuannya.

Berbeda dengan Nyono adalah pernyataan yang dibuat Sudisman dalam pengadilannya di bulan Juli 1967. Sudisman ditangkap pada bulan Desember 1966. Ia adalah salah seorang anggota dari empat anggota tinggi Politbiro, dan kare-

nanya merupakan orang keempat dalam hirarki kepemimpinan PKI setelah Aidit, Lukman, dan Nyoto. Pernyataan Sudisman ini juga didukung oleh Peris Pardede yang saat itu telah dicalonkan menjadi anggota Politbiro.

Peris Pardede juga memberikan bukti pada pengadilan Nyono. Pada waktu penyidangan itu ia mengatakan bahwa ia diundang untuk menghadiri pertemuan Politbiro "beberapa hari sebelum hari peringatan tanggal 17 Agustus 1965." Dalam pertemuan itu ia menceritakan bahwa Aidit berbicara mengenai perjalanan ke luar negeri yang baru dilaluinya yang diperpendek kepulangannya ketika ia mendengar kabar sakitnya presiden Soekarno. Dari kondisi sakit ini ada informasi dari dokter kepresidenan, presiden menghadapi dua pilihan yakni lumpuh atau meninggal, kecuali ia mau merubah kebiasaan hidupnya. Saat itu, Aidit memutuskan semacam perubahan yang lalu menjadi tak mungkin. Setelah mendiskusikan ancaman yang mungkin akan dilakukan "Dewan Jendral" dan juga keberadaan "perwira progresif", Aidit mengatakan sampai saat itu ia diminta pandangannya oleh "perwira progresif" soal apakah diperlukan mengambil tindakan preventif atau mengambil tindakan menunggu gerak "Dewan Jendral." Dalam pertemuan itu Aidit mengatakan bahwa ia secara pribadi cenderung memilih mengambil tindakan

pengecahan. Namun ketika ia mengundang pendapat dari peserta pertemuan itu tak ada seorangpun berbicara, karena itu Aidit melontarkan bagaimana jika Politbiro setuju agar masalah itu untuk sementara diserahkan pada Rapat Tertinggi (*Standing Committee*) Politbiro. Dan ketika peserta tak ada yang keberatan kemudian pertemuan itu ditutup. Kira-kira sepuluh hari kemudian Pardede menanyakan pada Sudisman mengenai keputusan itu. Dan Sudisman menjawab bahwa mereka memutuskan untuk mendukung sikap mengambil tindakan preventif yang akan dilakukan oleh "perwira progresif."¹⁷

Dalam pengadilannya di tahun 1967 Sudisman menegaskan apa yang sudah dinyatakan Pardede mengenai hasil pertemuan Politbiro yang menyerahkan tanggungjawab keputusan pada Rapat Tertinggi Politbiro. Tetapi keterangan dari Sudisman ini tidaklah pasti mengenai tanggal tepatnya pertemuan Politbiro diadakan. Pada satu point ia nampaknya setuju dengan kesaksian Pardede yang menerangkan bahwa pertemuan Politbiro telah diadakan pada "beberapa hari" setelah tanggal 17 Agustus, namun di lain tempat ia mengatakan bahwa pertemuan mengambil tempat pada tanggal 28 Agustus. Pada waktu yang lainnya lagi ia menyebut bahwa pertemuan Politbiro tanggal 28 Agustus itu telah menyepakati untuk menyokong aksi "perwira progresif." Ia mengakui bahwa ia tidak dapat meng-

¹⁷Kesaksian Peris Pardede dalam pengadilan Nyono. *Perkara Nyono*, hlm. 130-134.

ingat tanggal yang tepat kapan pertemuan itu diadakan. Jadi tampaknya rapat-rapat yang diadakan seperti dinyatakan Pardede sebagai berlangsung pada beberapa hari setelah tanggal 17 Agustus boleh jadi dalam kenyataannya berlangsung pada tanggal 28 Agustus, hari yang membuat keterangan Pardede secara langsung bertentangan dengan keterangan Nyono. Dan sedikit banyak keterangan Sudisman juga memberikan kesimpulan bahwa Rapat Tertinggi Politbiro setuju menyokong rencana "perwira progresif."

Mengikuti hasil keputusan yang menyokong "perwira progresif," Sudisman menerangkan bahwa Aidit kemudian meminta Nyono merekrut 2000 anggota ormas untuk menjadi pasukan cadangan yang akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi "perwira progresif." Lebih jauh, Sudisman juga diminta mengirim utusan agar mengingatkan pada cabang-cabang PKI di daerah untuk waspada. Pada bulan September, Sudisman kemudian juga mengirim utusan ke Medan, Palembang, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar menginformasikan kemungkinan-kemungkinan aksi "Dewan Jendral" kepada cabang-cabang PKI. Juga diinstruksikan kepada semua partai PKI di wilayah untuk memantau terus menerus perkembangan Jakarta lewat radio dan juga "membantu Dewan Revolusi." Dipertimbangkan juga gagasan agar

cabang-cabang PKI untuk mengembangkan kerjasama dengan partai dan kelompok di luar PKI yang ada dengan penyebaran-penyebaran statemen dan demonstrasi yang menyokong usaha coup dan dukungan Dewan Revolusi yang disusun oleh pemberontak. Tetapi para utusan itu tidak diberitahukan bahwa PKI sendiri terlibat dalam perencanaan aksi-aksi tersebut.

Dengan demikian Sudisman mengakui bahwa pemimpin PKI secara sadar menyokong usaha-usaha coup. Namun ia menyatakan bahwa PKI hanyalah membantu gerakan yang secara nyata dilakukan "perwira-perwira progresif." Tambahan lagi ia juga menyatakan bahwa keterlibatan pemimpin-pemimpin PKI dalam gerakan tidak berarti bahwa partai secara keseluruhan terlibat. Memikirkan secara mendalam tentang dukungan yang diberikan pada usaha coup ini, Sudisman sampai pada kesimpulan bahwa ia dan anggota Politbiro lainnya melihatnya sebagai suatu kesalahan dengan apa yang disebutnya sebagai langkah "oventurisme" yang "tidak didasarkan pada kesadaran dan pendirian yang kuat atas massa rakyat."¹⁸ Jadi gambaran yang diberikan Sudisman adalah keterlibatan marginal dari pemimpin PKI dalam usaha-usaha coup yang secara nyata dilakukan sendiri oleh sekelompok perwira Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

¹⁸Keterangan Sudisman dalam catatan saya (*summary* -Crouch) yang saya dasarkan pada kesaksiannya di pengadilan.

Pada bulan Maret 1967, Kamarusaman yang lebih luas dikenal dengan Syam tertangkap. Dalam persidangan Sudisman di bulan Juli 1967, Syam muncul menjadi saksi dan persidangan untuk dirinya baru dilaksanakan kemudian pada bulan Pebruari dan Maret 1968. Seperti disebut pada persidangan awal yakni persidangan Untung dan Sudjono, tokoh Syam ini diketahui banyak memainkan peran penting dalam usaha coup. Namun siapakah dirinya sebenarnya tak banyak diketahui sejak ia tertangkap.

Menurut Syam sendiri, ia bertemu pertama kali dengan Aidit sejak masa-masa revolusi di Yogyakarta pada tahun 1945-1946. Kemudian Syam pindah ke Jakarta di mana ia menjadi salah seorang pengurus organisasi buruh pada buruh pelabuhan Tanjung Priuk. Di tempat inilah, —kata Syam— saat kepulangan perjalanan Aidit dari Cina tertahan oleh Polisi karena tidak membawa tiket, ia bertemu lagi dengan Aidit pada tahun 1949. Syam waktu itu sempat menolong Aidit sehingga bisa lolos, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai pengurus organisasi buruh di tempat itu. Dari kejadian ini pula Aidit kemudian mengajak Syam bergabung dengan PKI. Pada antara tahun 1952 – 1955 Syam bekerja sebagai staf pada SOBSI, organ buruh yang paling dominan dalam PKI, dan pada tahun 1957 ia menjadi asisten pribadi Aidit. Syam kemudian juga bekerja di sekretariat PKI pada departemen organi-

sasi. Tugas utama Syam adalah mendekati Angkatan Bersenjata untuk menarik simpati kepada PKI. Aktivitas-aktivitasnya ini dimulainya sejak 1957 ketika ia menjadi informan seksi inteljen untuk wilayah kerja kota Jakarta.

Akhir tahun 1964 Politbiro PKI menetapkan untuk membentuk Biro Khusus untuk melancarkan kerja-kerja partai di Angkatan Bersenjata. Syam ditunjuk untuk mengepalai biro ini yang mekanismenya bertanggungjawab secara langsung kepada ketua partai, Aidit. Para kolega utama Syam pada Biro Khusus di tingkat pusat ini adalah Pono dan Waluyo (yang juga lebih dikenal dengan nama Bono). Biro Khusus juga dibentuk di beberapa wilayah yang kedudukannya independen dengan cabang-cabang partai di daerah itu. Pembentukan yang seperti ini membuat sekretariat cabang partai tidak selalu mengetahui apa yang dilakukan orang-orang Biro Khusus di daerahnya. Menurut Syam sepanjang tahun 1965 kegiatan-kegiatan Biro Khusus “berjalan dengan mulus” hanya di tujuh propinsi. Dan dari tujuh propinsi itu, kegiatan di Jawa Tengah adalah yang paling sukses di mana terbentuk kontak dengan 250 simpatisan dari Angkatan Bersenjata. Sedang urutan kedua, kegiatan di Jawa Timur dengan 200 simpatisan. Jumlah 80-100 simpatisan berhasil direkrut di Jawa Barat. Sementara di daerah Jakarta ada 40-50 simpatisan, Sumatera Utara 30-40 simpatisan, Sumatera Barat

¹⁹Perkara Syam. Mahkamah Militer Luar Biasa, Perkara Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah (Syam) (Djakarta, 1968 –cetak ulang stensilan/cyclostyled), hlm. 6.

30, dan Bali 30 simpatisan.¹⁹

Pada tanggal 12 Agustus 1965 beberapa hari setelah kepulangan Aidit dari lawatan luar negerinya, Syam dipanggil ke kediaman Aidit. Aidit berbicara mengenai sakitnya presiden yang makin parah dan kemungkinan "Dewan Jendral" mengambil tindakan segera jika presiden mangkat. Aidit mengatakan pada Syam bahwa ia telah mendapat informasi mengenai "Dewan Jendral" dari Sukirman, salah seorang anggota Politbiro PKI yang juga kakak Mayor Jendral Parman- Kepala Inteljen Angkatan Darat- salah seorang yang diduga kuat anggota "Dewan Jendral."²⁰ Aidit memerintahkan kepada Syam "untuk menghitung kekuatan kita (PKI-pen)" dan "mempersiapkan suatu gerakan." Pada tanggal 13 Agustus Syam bertemu dengan Pono dan Waluyo untuk mendiskusikan kemungkinan siapa saja yang bisa diajak dalam "gerakan." Mereka memutuskan untuk mendekati Kolonel Latief, Komandan Brigade Infantri I di Jakarta, Lt. Kol. Untung komandan salah satu dari tiga batalion Resimen Tjakarabirawa — pasukan pengawal Istana di Jakarta—, Mayor AU Sujono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim. Ketiga orang



dari angkatan bersenjata itu setuju terlibat dalam gerakan itu. Tetapi Aidit merasa bahwa jumlah perwira perlu lebih banyak, karena itu ia mengusulkan untuk membuat kontak dengan Mayor Sigit—salah seorang komandan batalion dalam Brigade Infantri di bawah komando Latief, dan juga menghubungi Kapten Wahyudi yang mengomandoi Batalion Pertahanan Udara. Kedua orang yang dihubungi ini setuju untuk bergabung dalam gerakan.

Pada tanggal 6 September, ke lima konspirator militer itu bertemu untuk pertama kali dengan Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI. Mereka mengadakan pertemuan di rumah Wahyudi. Dalam pertemuan itu Syam berbicara mengenai sakitnya presiden, "Dewan Jendral" dan kesukaran-kesukaran ekonomi yang dihadapi prajurit biasa. Dan disepakati dengan penuh pada pertemuan itu untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap "Dewan Jendral." Selama dua minggu berikutnya, pertemuan diadakan lagi dengan membahas peta kekuatan yang dapat dipakai untuk menyokong kekuatan mereka. Tetapi pertemuan pada tengah bulan berikutnya, Sigit dan Wahyudi

²⁰Mayor Jendral Parman adalah salah satu Jendral yang dibunuh pada tanggal 1 Oktober. Sukirman dibunuh pada tahun 1966.

tampaknya mulai menarik diri karena mereka tidak yakin dapat memegang unit-unit mereka secara penuh untuk bergerak. Kemudian muncul tanggapan yang memandang masalah itu berkaitan dengan tidak adanya jendral dalam kepemimpinan gerakan ini. Karena merasa mengajak Jendral merupakan kebutuhan yang penting, Syam menjanjikan akan mengontak Brig. Jendral Suparjo, komandan Komando Pertempuran di Kalimantan. Syam mengenal baik Suparjo sejak akhir 1950-an dan secara teratur sering bertemu dengannya untuk mendiskusikan masalah-masalah politik. Melalui istrinya, Suparjo tiba di Jakarta tanggal 28 September. Suparjo mengatakan bahwa gerakan harus dimulai dan ia menyetujui untuk bergabung di dalamnya.

Selama tiga minggu berikutnya rencana gerakan telah dibicarakan dengan matang. Menurut Syam, saat itu ia membuat daftar "target." Pada daftar yang asli itu —lepas dari enam jendral yang akhirnya diseret, dan juga lepas dari Jendral Nasution yang sempat bisa lolos—terdapat nama-nama antara lain mantan Kepala Inteljen Brig. Jendral Sukindro, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Deputy Perdana Menteri ke III Dr. Chairul Saleh. Tetapi Aidit waktu itu menghapus nama Chairul Saleh dan Moh. Hatta dari daftar tersebut karena ia

menginginkan aksi ini mengesankan sebatas pada Angkatan Darat. Sukendro lolos dari pembunuhan karena ia merupakan salah seorang delegasi Indonesia pada peringatan hari kemerdekaan Cina tanggal 1 Oktober. Syam juga mengatakan bahwa dirinya dan Aidit telah menyiapkan satu kekuatan yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September," dan juga menyiapkan daftar orang-orang yang akan ditunjuk bagi "Dewan Revolusi" baru sesuai dengan rencana gerakan yang telah ditetapkan.²¹

Kesaksian Syam dengan demikian berbeda secara signifikan berkaitan dengan implikasinya dengan apa yang dinyatakan dalam kesaksian Sudisman. Dalam versi Sudisman "perwira progresif" mengambil inisiatif dan disokong oleh PKI, Sementara dalam versi Syam, Aiditlah yang mengambil prakasa dengan menginstruksikan kepada Syam untuk menggalang perwira pemberontak yang bisa diajak untuk menjalankan rencana yang disusun PKI. Bersama dengan Aidit, Syam menyiapkan daftar "target" dan segala pernyataan yang akan dilontarkan gerakan. Jadi, dari versu Syam ini, "perwira progresif" tidak memainkan peran yang independen. Mereka hanyalah alat yang siap digunakan apa saja oleh PKI.

Meskipun ada tiga versi yang saling berbeda, namun semua versi menunjuk

²¹Versi Syam dalam summary saya (Crouch) yang didasarkan atas kesaksian Syam pada persidangannya dan pengadilan Sudisman.

pada keterlibatan PKI. Juga berdasarkan pada keterangan Nyono sekalipun, yang walaupun ia menolak ketelibatan PKI sebagai partai, keterangannya menegaskan bahwa *toh* Politbiro pada akhirnya memutuskan untuk menyokong "perwira progresif" dan menegaskan pula Nyono sendiri kenyataannya mendukung gerakan perwira progresif. Seandainya presiden jadi mangkat dan "Dewan Jendral" kapan saja siap beraksi — sebagaimana diyakini Nyono— sangat dapat dipercaya bahwa PKI dalam kenyataannya memutuskan untuk bergabung dengan "perwira progresif" sebagaimana di gambarkan Sudisman dan Peris Pardede, ketimbang PKI menunggu presiden mengambil tindakan sebagaimana digambarkan Nyono. Nampaknya ada ketidakmungkinan yang khusus bahwa Nyono mengambil sikap membantu "perwira progresif" yang mana prakasa ini tanpa sepengetahuan kawan-kawannya di Politbiro. Jadi memang akan tampak disana bertentangan antara keterangan Nyono sebagai satu versi dengan Sudisman dan Paris Pardede sebagai versi yang lain. Tetapi jelas terlihat pula bahwa versi Sudisman dan Pardede lebih bisa diterima.

Perbedaan keterangan antara yang disampaikan Sudisman dengan apa yang disampaikan Syam lebih sulit lagi dicari jawabannya. Versi Syam tidaklah terlalu banyak bertentangan dengan keterangan Sudisman, lebih banyak sebagai perluasannya. Keterangan Sudisman menyebutkan Politbiro PKI memutuskan membantu gerakan yang sudah dirancang

gerakannya oleh "perwira progresif." Syam dalam hal ini tidak mengatakan sebaliknya, tetapi ia menambahkan bahwa Biro Khusus PKI lah yang menyusun rencana dari gerakan yang dilakukan "perwira progresif." Dengan demikian ada persoalan yang krusial yang harus diperhatikan berkaitan dengan tingkat kualitas perwira progresif bertindak secara otonom. Apakah mereka semata agen dari PKI atau mereka mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri?

Dari pengadilan Mahmillub bukti-bukti yang mengemuka pada kenyataannya tidak menunjukkan bahwa perwira-perwira yang terlibat dalam usaha coup tidak bertindak semata karena agent PKI. Tetapi seperti bisa ditunjukkan, paling tidak ini yang terjadi di Jakarta, perwira-perwira itu secara sadar bertindak dalam satu komplotan dengan beberapa anggota PKI. Pola komplotan ini boleh saja prosesnya berbeda dalam dua pusat utama aktivitasnya, yakni yang di Jakarta dan di Jawa Tengah. *Link* kelompok perwira Jakarta terlihat begitu luas dari pada hal yang sama terjadi di Jawa Tengah.

Di Jakarta, pemimpin coup itu adalah Lt. Kol. Untung, Kol. Latief, Mayor (AU) Sujono dan Brig. Jend Supardjo. Untung, Latief dan Sujono terlibat dalam perencanaan sejak awal mula. Hal itu nampak pula pada Suparjo yang bergabung pada momen-momen terakhir walau ia berkedudukan di Kalimantan, tetapi adalah tampak pasti secara keseluruhan ia selalu memperoleh informasi. Untung dan Latief keduanya adalah perwira yang pernah

bertugas di Kodam Diponegoro. Untung, sudah dikenal sebelumnya berkaitan dengan terjun payungnya yang pertama kali di Irian Jaya pada tahun 1962. Ia pindah dari Divisi Diponegoro menjadi komandan batalion pengawal istana pada Januari 1965. Bigade Infantri di mana Latif di dalamnya, juga bagian dari Divisi Diponegoro sebelum pemindahannya ke Jakarta pada bulan Nopember 1963. Sujono yang juga orang Jawa adalah Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim. Dia pula yang disertai tugas untuk pelatihan-pelatihan bagi sukarelawan sejak Juli 1965. Supardjo lahir di Jawa tetapi bertugas di Divisi Siliwangi Jawa Barat. Pada bulan Nopember 1964 ia ditunjuk untuk mengomandoi pasukan payung yang dioperasikan pada Komando Panglima Perang di Kalimantan untuk melawan Malaysia.

Pada persidangannya, Syam mengklasifikasi perwira yang berhubungan dengan Biro Khusus PKI ke dalam dua kategori. Pertama, kategori "simpatisan" dan kedua "calon anggota/kader" partai. Dalam persidangan teridentifikasi bahwa meski Untung, Latief, Sujono, dan Supardjo telah berhubungan dengan anggota Biro Khusus, tetapi tidak ada petunjuk bahwa

mereka ini lebih dari sekedar "simpatisan" yang ingin berkomplot dengan PKI untuk mencapai tujuan khusus, seperti tujuan melindungi posisi presiden Soekarno. Untung misalnya, dalam persidangannya menolak secara keras bahwa ia terikat kepada PKI, meskipun ia mengakui bahwa beberapa rekan di kampungnya pada tahun 50-an telah menjadi komunis. Dan juga bahwa ia kemudian dikenal dekat dengan beberapa anggota PKI sejak pertemuan itu.²² Hampir sama dengan Untung, Suparjo juga menolak mengenai hubungannya dengan PKI, juga menolak sebagian peranannya secara nyata dalam pembelotan PKI pada peristiwa Madiun 1948. Walau ia mengakui bahwa ia bertemu dengan Syam pada tahun 1965 selama operasi untuk mengakhiri usaha coup yang dilakukan Lubis. Ia menyatakan bahwa ia hanya memulai lagi kontak dengan Syam ketika ia mendengar rumor mengenai "Dewan Jendral."²³ Sementara latar belakang Latief sedikit kurang jelas, karena ia tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dan sebelum pengadilan Mahmillub, walau sebagai saksi ia pun tak diijinkan didekati secara personal. Kecuali, setelah kasus Pono di bulan Januari 1972 digelar, ketika ia menyatakan penolakan-

²²Kesaksian Untung pada persidangan Untung. *Perkara Untung*, hlm. 37–38, dan 220.

²³Kesaksian Supardjo dalam persidangan Supardjo. Mahkamah Militer Luar Biasa, *Perkara Brig. Jend. Supardjo* (Jakarta, 1968—cetak ulang).

²⁴W. F. Wertheim menyatakan bahwa tidak dijinkannya Latief tampil di awal-awal pengadilan yang digelar karena pertemuan Latief dengan May. Jend. Suharto pada malam sebelum usaha coup terjadi. W. F. Wertheim, "Suharto and the Untung Coup—The Missing Link", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. I, No. 2 (Winter 1970). Penampakan Latief pada pengadilan Pono dimuat Kompas (Jakarta), 31 Januari 1972.

nya sebagai anggota PKI.²⁴ Jalur Sujono dengan PKI tentunya lebih kuat karena ia memang memikul tugas berkaitan dengan latihan-latihan semi resmi yang dilaksanakan untuk sukarelawan. Yang hampir semua relawan tersebut direkrut dari organisasi massa PKI. Tetapi, pada saat yang sama, ketidaksukaan Sujono pada pemimpin Angkatan Darat pada waktu itu memberikan peran yang lebih besar dalam training-training itu kepada banyak perwira Angkatan Udara, di mana perwira-perwira AU sendiri tidak mempunyai hubungan dengan PKI. Jadi, walau jelas memungkinkan bagi perwira-perwira ini secara nyata melakukan sesuatu yang mendukung PKI, tetapi semua ini jelas tidak terbukti pada pengadilan Mahmillub.

Meskipun tidaklah jelas seberapa dekatnya ikatan di antara perwira-perwira pelaku gerakan dengan PKI sebelum Agustus 1965, nampaknya ikatan itu menunjukkan bahwa perwira-perwira ini dipersiapkan melakukan kerja sebagai sebuah komplotan yang tertutup dengan wakil partai pada persiapan usaha-usaha coup. Menurut Syam dalam kesaksiannya, Untung, Latief dan Sujono dihubungkan dengan Pono dan Waluyo — anggota Biro Khusus— pada pertengahan Agustus. Dari hubungan itu, perwira-perwira ini setuju bergabung dalam gerakan. (Sebagai tambahan catatan, awalnya bergabung

juga Mayor Sigit dan Kapten Wahyudi tetapi kemudian mereka menarik diri). Mereka bertemu sebagai sebuah kelompok pertama kali di rumah Wahyudi pada tanggal 6 September bersama dengan Syam dan Pono. Keterangan Syam ini, ternyata berbeda dengan keterangan Untung berkaitan dengan masalah yang muncul yakni mengenai siapa yang mengambil inisiatif pertemuan. Keterangan Untung dalam pengadilan mengatakan bahwa ia sudah lama mendengar rencana "Dewan Jendral" yang akan melakukan coup dan karena dia anggota pasukan Cakrabirawa yang diberi tugas melindungi presiden maka dia memutuskan membentuk gerakan untuk mencegah tindakan jendral yang tidak loyal itu. Ia menghubungi Latief dan bersamanya mengambil inisiatif dengan mengadakan pertemuan itu.²⁵ Keterangan bahwa inisiatif lebih dulu datang dari Latief tersebut dan bukan Syam maupun Pono juga dinyatakan oleh keterangan Sujono dalam kesaksiannya. Yakni, bahwa yang mengundang Sujono adalah Latief.²⁶ Jadi Untung memberi kesan bahwa ia dan Latief adalah pemrakarsa gerakan. Kesulitan pokok dari keterangan yang disampaikan Untung ini adalah pada persoalan pertemuan itu dihadiri Syam dan Pono. Untung mengakui bahwa ia tidak kenal dengan dua orang tersebut sebelum pertemuan itu.²⁷ Sayangnya, pada saat

²⁵Kesaksian Untung pada perisidangan Untung. *Perkara Untung*, hlm. 35, 36, 55, 58.

²⁶Sujono pada pengadilan Untung, *Ibid.*, hlm. 102.

²⁷Untung dalam persidangan Untung. *Ibid.*, hlm. 57.

persidangannya, Untung tidak ditanya bagaimana kejadiannya Syam dan Pono bisa hadir pada pertemuan itu. Menurut keterangan Wahyudi, pemilik rumah tempat pertemuan itu, Syam dan Pono tiba ditemani (bersama) Latief.²⁸ Dan baik Wahyudi maupun Sujono juga mengakui bahwa mereka tidak kenal siapa Syam dan Nyono.²⁹

Bukti-bukti di atas membawa pada beberapa kemungkinan interpretasi. Pertama, adalah sangat mungkin Untung, Sujono dan Wahyudi bohong. Sepanjang Pebruari, saat pengadilan diadakan, PKI tidak hanya di tuduh melakukan coup akan tetapi juga PKI penyebab semua penyakit yang lain masyarakat Indonesia. Situasi demikian membuat semua perwira pemebrontak ini sebelum maju di pengadilan mempunyai alasan yang kuat untuk memutus semua kaitan dengan PKI. Adalah lebih baik untuk menunjukkan bahwa aksi-aksi mereka sebagai tindakan patriot untuk melindungi presiden dari "Dewan Jendral" ketimbang mengakui mempunyai hubungan kerjasama dengan PKI. Kedua, mungkin hanya Latief yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan PKI. Untung mengatakan bahwa ia dan Latief bersama-sama mengambil inisiatif dalam mengadakan pertemuan itu. Menu-

rut Sujono, Latief yang mengundang untuk datang ke pertemuan tersebut, dan kata Wahyudi ia melihat Syam dan Pono datang ditemani Latief ke pertemuan. Jadi mungkin Syam bekerja melalui Latief. Ketiga, tampaknya bisa ada kemungkinan yang sama bahwa Latief yang memiliki inisiatif pertemuan untuk mencari dukungan dari PKI melalui Syam. Latief mungkin mengundang Syam dan Pono untuk menghadiri pertemuan yang mana ia dan Untung sebagai pengundang. Namun, karena pertanyaan soal ini dalam persidangan Latief tak diajukan kepadanya, soal perananan siapa pemrakarsa pertemuan ini masih belum jelas.³⁰

Meskipun Supardjo sudah berhubungan dengan Syam maupun perwira pemberontak sejak lebih dari sebulan sebelumnya, keterlibatan aktifnya dalam gerakan nampaknya baru mulai pada saat-



²⁸Wahyudi pada pengadilan Untung. *Ibid.*, hlm. 78.

²⁹*Ibid.*, hlm. 79. Sujono pada pengadilan Nyono. *Perkara Nyono*, hlm. 208.

³⁰Saya tidak mendapat informasi dari kesaksian Latief pada pengadilan Pono, kecuali informasi yang saya dapatkan dari laporan ringkas beberapa koran.

saat akhir. Dengan tanggap, ia di Kalimantan memang sudah mengambil kesimpulan bahwa suatu tindakan sabotase terhadap kebijakan konfrontasi Soekarno tengah berkembang di jajaran pimpinan Angkatan Darat. Berdasarkan kesaksiannya, Supardjo mendapat informasi mengenai "Dewan Jendral" dari Latief pada bulan Maret 1965. Ia kemudian menghubungi Syam dengan harapan mendapat informasi tambahan. Meskipun Supardjo tinggal di Kalimantan, ia setiap bulan mengunjungi saudaranya di Jakarta. Dengan menggunakan kesempatan dalam kunjungannya ini ia mencari informasi mengenai perkembangan terakhir dari Syam. Ia juga secara teratur memberi laporan kepada Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara Omar Dhani, mengenai ketidakpuasan yang kian berkejang di jajaran perwira Angkatan Darat, sebelum keterlibatan PKI yang mulai masuk pada bulan Agustus. Ketika Syam memberi tahu bahwa di bulan Agustus "Dewan Jendral" tengah merencanakan coup, maka Supardjo minta konfirmasi tentang yang ia dengar mengenai situasi Jakarta yang makin kritis. Pada tanggal 28 September Supardjo tiba di Jakarta karena salah satu anaknya sakit keras. Saat ia bertemu Syam, ia diberitahu bahwa gerakan terhadap jendral-jendral itu mulai bergerak. Dari keterangannya, saat itu ia setuju bergabung dengan

gerakan itu pada sore hari tanggal 29 September.³¹ Tetapi tampaknya mungkin sekali bergabungnya ia dengan gerakan ini karena ia sudah memperoleh pemahaman yang mendalam dengan Syam atau mungkin juga Latief.

Bukti-bukti yang dikemukakan "perwira progresif" menegaskan bahwa PKI terlihat dalam plot. Akan tetapi hal ini tidaklah menegaskan dugaan banyak orang sebagaimana disebarkan oleh Angkatan Darat, yakni "perwira progresif" itu sekedar agen dari PKI. Nampaknya sangat mungkin bahwa Untung dan Latief sudah memulai berembug mengenai kebutuhan menentang "Dewan Jendral" sebelum rapat-rapat diadakan dengan Syam. Lebih dari itu, baik Sujono maupun Supardjo kelihatannya juga telah mempunyai alasan sendiri untuk menentang coup dari jajaran pimpinan Angkatan Darat. Tentu saja mungkin pula anggota Biro Khusus mengindoktrinasi perwira-perwira tersebut sedemikian gencar sampai mereka siap dapat melaksanakan keinginan PKI. Tetapi tampaknya justru lebih besar kemungkinan bahwa indoktrinasi semacam itu tak diperlukan. Jika memang Biro Khusus atas perintah Aidit yang mengambil inisiatif, tampaknya lebih mungkin bahwa fungsinya sekedar mengajak perwira pemberontak itu bekerjasama ketimbang fungsinya dalam memberikan motivasi (greget awal). Juga sangat

³¹Kesaksian Supardjo pada persidangan Supardjo dan kesaksian Omar Dhani pada persidangan Omar Dhani. *Perkara Supardjo dan Mahkamah Militer Luar Biasa, Perkara Omar Dhani Ex. Laksamana Madya Udara dalam peristiwa* (Djakarta, 1968—cetak ulang stensilan).

mungkin bahwa sekali PKI menjadi terlibat, Syamlah —yang bertindak atas nama agen Aidit— memainkan peranan yang sangat menentukan. Walau bukti-bukti dari peradilan Syam dan Untung terlihat agak merujuk ke situ, dan dalam kenyataannya, sebagaimana keterangan pada pengadilan Untung —yang menyebutkan kemungkinan pertemuan itu diprakarsai oleh Latief dan Untung dan mungkin juga bersama dengan Supardjo— telah memberikan indikasi rencanarencana mereka sendiri sudah dimulai sebelum mereka dihubungkan dengan Syam yang mereka undang untuk mengikuti mereka, ketimbang sebaliknya.

Hipotesis yang kemudian ini memperoleh kredibilitasnya ketika kita menetapkan “Gerakan 30 September” di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah perwira menengah pemberontak menurunkan perwira yang memerintah dalam sejumlah pengambilalihan yang terkoordinasi termasuk KODAM Divisi Diponegoro dan dua divisi yang membawahi tiga KOREM (yakni Korem Salatiga dan Korem Yogyakarta) dan Markas Besar Brigade Infantri ke 16 di Surakarta, meski sementara itu pengambilalihan terhadap resot militer ketiga di Purwokerto gagal. Pada markas besar divisi di Semarang pemimpin gerakan ini adalah Kepala Inteljen Kolonel Suherman, Kolonel Marjono dan Letkol Usman. Tiga tokoh

gerakan ini dengan pendukungnya —berbarengan dengan lemahnya gerakan— semuanya melarikan diri dari Semarang. Mereka ditangkap pada bulan Desember dan dengan cepat dieksekusi. Jadi mereka tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan motif dan aksi mereka.

Begitu jauh bukti-bukti lemah dibuat untuk menunjukkan luas dan cirinya persekongkolan mereka dengan PKI. Sejumlah kecil informasi yang ada mengenai latar belakang mereka tidak bisa menunjukkan mereka mempunyai keterkaitan dengan PKI. Dalam hal Suherman, posisinya sebagai kepala inteljen dan kenyataan bahwa ia baru saja pulang dari training di Fort Worth Amerika paling tidak hanya menyatakan tak ada seorang pun yang menduganya ia menjadi pendukung PKI sebelum usaha-usaha coup itu dilakukannya. Meskipun mungkin bahwa perwira-perwira menengah ini dan kelompoknya di kota, semuanya “di bawah kontrol” PKI, tetapi tidaklah ada bukti kuat yang kelihatannya mengindikasikan ke arah hal tersebut.³² Perwira pelaku pemberontakan di Jawa Tengah yang diajukan ke pengadilan hanyalah Mayor Mulyono. Ia menurunkan KOREM Yogyakarta dan memproklamirkan dirinya sebagai ketua Dewan Revolusi setempat. Mulyono mengakui ia salah seorang penyokong PKI, dan itu ditunjukkan oleh kedekatannya dengan

³²Dalam pandangan Nugroho Notosusanto, “partai PKI mengontrol separuh dari semua pimpinan staf umum dalam setiap KODAM.” Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh, *The Coup Attempt*, hlm. 43.

anggota PKI Wirjomartono, yang mempunyai peran dalam kerja-kerja membangun hubungan dengan simpatisan PKI di angkatan bersenjata. Tetapi dalam pengadilannya tak ada petunjuk bahwa aksi Mulyono tanggal 1 Oktober itu atas perintah Wirjomartono. Adalah mungkin sekali Mulyono mendapat perintah dari Suherman dan kawan-kawannya di Semarang. Bukti-bukti pada saat pengadilannya memperlihatkan ada pesan sekitar pukul 3 sore untuk Mulyono yang berisi himbauan agar Mulyono menyokong Dewan Revolusi. Namun tidaklah sampai pukul 9 malam ada pengumuman melalui radio yang menyebut diri bernama Mulyono sebagai ketua Dewan Revolusi setempat. Hal ini sebagai kelanjutan penerimaan telpon yang datang dari Markas Divisi Kodam Semarang pada pukul 7 malam yang menyebarkan intruksi agar menyokong Dewan Revolusi.³³

Hipotesa mengenai independennya aksi-aksi perwira di Jawa Tengah dari

keterlibatan PKI diperkuat dengan mengambil perbandingan kejadian yang sama saat itu di daerah lain. Usaha coup telah melebar dan menyamakan dukungan di banyak bagian di Jawa Tengah. Tetapi sebenarnya gelombang dukungannya tidak mengambil bentuk yang sama dengan di daerah lain di mana basis PKI kuat seperti yang terjadi di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Ketiadaan bukti yang menunjukkan bahwa PKI "mengontrol" Suherman dan kawan-kawannya adalah wajar untuk meyakini bahwa mereka melakukan gerakan-gerakan itu didasarkan pada alasan-alasan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Mungkin motivasi mereka adalah sebagaimana digambarkan Cornel Paper, atau mereka mungkin mempunyai keluhan tidak hanya terhadap kepemimpinan Angkatan Darat di Jakarta namun juga terhadap kepemimpinan Angkatan Darat di Jawa Tengah. Kemungkinan kuat adalah mereka mengejawantahkan kesetiannya

³³Lihat pengadilan Mulyono. Khususnya kesaksian Mulyono dan Mayor Surono Hartono yang menjalankan panggilan telpon dari Semarang. Mahkamah Militer Luar Biasa, *Perkara Ex-Maj. Mulyono* (Jakarta, 1968—cetak ulang). Menurut J. M. van der Kroef, "peran yang dimainkan secara pokok oleh "Wirjomartono nampaknya meyakinkan dengan kenyataan yang ada (substantiated) secara menyeluruh". J. M. van der Kroef, "Interpretations of the 1965 Indonesian Coup", *Pacific Affairs*, No. 4 (Winter 1970-71), hlm. 565. Pembacaan saya dengan melihat bukti pada pengadilan pelaku G 30 September lainnya yang relevan tidak menegaskan hal tersebut. Sedang Notosusanto mengatakan Wirjomartono adalah pimpinan "Biro Khusus" di Yogyakarta (Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh, *The Coup Attempt*, hlm 45). Kesimpulan Notosusanto nampaknya tidak meyakinkan ketika dihubungkan dengan keterangan Wirjomartono pada pengadilannya. Wirjomartono mengatakan bahwa ia melakukan kontak dengan Mayor Mulyono atas perintah Sudiyono, sekretaris PKI Yogyakarta. Karena Biro Khusus melakukan operasinya bersifat independen terhadap cabang-cabang PKI, maka nampaknya sangat tidak mungkin Wirjomartono melaksanakan langkahnya atas intruksi Syam. Agak lebih ada kemungkinan langkah Wirjomartono justru mendapat informasi dari Sudisman yang memberikan informasi ke cabang-cabang PKI yang ada.

kepada Soekarno yang kuat pada rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur dan menganggap Nasution dan Yani sebagai tokoh yang tidak loyal. Nampaknya jelas para pemimpin PKI di Jawa Tengah dan khususnya orang Biro Khusus sadar tentang adanya ketidakpuasan di dalam Divisi Diponegoro. Tentu saja pemimpin PKI mempunyai kepentingan dalam membantu para pemberontak, walau para pemberontak itu tidak mempunyai alasan untuk menolak dukungan dari pemimpin PKI. Namun di sana tak ada yang meyakinkan bahwa PKI memiliki pengaruh yang krusial dalam pembuatan keputusan yang dibuat perwira pemberontak itu.

Rantai atau jalur hubungan apa antara perwira pemberontak di Divisi Diponegoro dengan gerakan di Jakarta? Dengan ketiadaan bukti-bukti yang memuaskan, orang memang hanya dapat berspekulasi. Baik Untung maupun Latief keduanya berasal/pernah bertugas di divisi Diponegoro yang secara pribadi dekat dengan perwira pemberontak di Semarang. Untung pernah menjadi komandan satu kompi di dalam batalion Suherman. Setelah pengangkatannya di Jakarta pada awal tahun 1965 Untung melakukan dua kunjungan ke Jawa Tengah, kunjungan yang kedua itu ketika mengawal presiden sekitar Agustus.³⁴ Nampaknya mungkin sekali ia bertemu dengan Suherman selama kunjungan kedua ini dan mendis-

kusikan persoalan "Dewan Jendral" dengannya. Pada waktu itu mungkin Suherman sudah memutuskan memrakarsai beberapa tindakan preventif. Pada kepulangannya ke Jakarta, Untung lalu berupaya menginformasikannya kepada Latief mengenai rencana yang sedang disusun di Semarang. Sementara Syam yang diperintahkan Aidit untuk menggalang dukungan untuk "gerakan." Mungkin Syam mengetahui tentang adanya kelompok perwira pemberontak di Jawa Tengah, sehingga ia menghubungi Untung dan Latief yang diketahui mempunyai kontak dengan kelompok itu. Jadi adalah mungkin bahwa PKI menjadi terlibat dalam suatu gerakan yang gerakan itu semula berawal di Divisi Diponegoro.

Bukti-bukti dari pengadilan Mahmillub mengindikasikan tujuan usaha-usaha coup adalah untuk menyingkirkan kepemimpinan di Angkatan Darat yang sudah dianggap bejat (*hawkish*) yang dicurigai merencanakan gerakan menentang baik Presiden maupun PKI. Dari bukti-bukti di pengadilan tidak menunjukkan bahwa "Gerakan 30 September" berharap akan mendominasi pemerintahan setelah tanggal 1 Oktober, dan juga tidak menunjukkan gambaran PKI sebagai komplotan dengan motif memperkuat posisinya dalam pemerintahan. "Coup agaknya lebih merupakan pukulan yang

³⁴Kesaksian Kapten Kuntjoro pada pengadilan Untung. *Perkara Untung*, hlm. 146.

³⁵Pandangan semacam ini juga dianut Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *The Coup Attempt*, hlm. 9.

sifatnya mendahului (*pre-emptive*) terhadap lawan PKI yang paling berbahaya.³⁵ Jika PKI dan para simpatisannya di militer bertujuan mengambil alih atau mendominasi pemerintahan, maka pembunuhan beberapa jenderal tidak akan menjadi suatu masalah besar. Dan karena tujuan "coup" pada dasarnya lebih bersifat defensif, dengan terbunuhnya beberapa jenderal itu merupakan kesalahan yang membawa malapetaka. Nampaknya kabar bahwa akhirnya beberapa jenderal dibunuh merupakan faktor utama yang mempengaruhi dukungan presiden Soekarno terhadap gerakan. Lebih jauh, dengan terbunuhnya beberapa jenderal membuat gerakan semakin tipis kemungkinannya mendapat dukungan atau paling tidak mengurangi sikap pembiaran dari pimpinan Angkatan Darat yang masih hidup.

Ada indikasi kuat pada bukti-bukti di pengadilan bahwa pembunuhan terhadap para jenderal itu bukan merupakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh pelaku komplotan (*plotter*).³⁶ Kesaksian Syam berkaitan dengan masalah ini agak bertentangan. Ia mengatakan bahwa tujuan gerakan adalah menangkap dan membawa para jenderal itu ke Dewan

Revolusi. Dewan ini kemudian akan "menginvestigasi" rencana coup yang akan dilaksanakan mereka.³⁷ Dalam pengadilan Sudisman, Syam memberikan keterangan yang sama namun beberapa menit kemudian ia mengatakan bahwa perintah membunuh jenderal itu sudah merupakan keputusan pada pertemuan tanggal 29 September yang dihadiri oleh ia, Pono, Untung, Latief dan Sujono.³⁸ Untung pada persidangannya menyangkal memberikan perintah membunuh jenderal itu walau ia mengakui memberikan perintah kepada Letnan Dul Arief, komandan pasukan yang mendatangi rumah-rumah jenderal, untuk memastikan tak ada seorang jenderal pun yang boleh lolos.³⁹ Sejumlah parjurit yang bertugas mendatangi rumah para jenderal itu (*nggropyok*) memberikan keterangan bahwa Dul Arief memerintahkan mereka mengambil para jenderal itu "hidup atau mati."⁴⁰ Kejadiannya pada proses penjemputan itu, tiga orang jenderal termasuk Yani mengadakan perlawanan dan akhirnya dibunuh di rumah mereka. Sementara jenderal yang lainnya dibawa-bawa hidup-hidup ke Lubang Buaya di Pangkalan Halim. Menurut perwira yang ditempatkan

³⁶Pauker menyatakan "garis operasi politik (dari peristiwa ini) turun pada jenjang apapun diarahkan untuk membunuh pada komplotan ini." G. Pauker, "The Gestapu Affair of 1965", *Southeast Asia*, Vol. I No. 1 (Winter 1971), hlm. 55-66.

³⁷Kesaksian Syam pada persidangan Syam.

³⁸Kesaksian Syam pada pengadilan Sudisman. Mahkamah Militer Luar Biasa, *Perkara Sudisman* (Jakarta, 1968—cetak ulang).

³⁹Kesaksian Untung pada persidangan Untung. *Perkara Untung*, hlm. 59.

⁴⁰Lihat kesaksian-kesaksian yang ada pada persidangan Untung. *Ibid.*, hlm. 123, 133, 135, 139.



kan di Lubang Buaya, Mayor AU Gatot Sukrisno, baik ia dan Dul Arief sangat gelisah saat mendapatkan tiga jenderal itu sudah “siap dikuburkan” (been put to sleep). Dul Arief menginginkan Gatot segera membunuh tiga jenderal yang masih hidup itu, namun saat itu Gatot berserikeras mengirim kabar dulu pada Mayor Sujono yang kemudian mendapatkan jawaban “habisi.”⁴¹ Menurut Sujono perintahnya itu sekedar menirukan atau menyalurkan saja perintah Latief.⁴² Pada persidangannya Syam mengatakan bahwa dirinya mengajukan usul agar jenderal yang masih hidup untuk ditembak dan ini menurutnya pada saat itu yang lain setuju.⁴³

Temuan akhir yang paling mungkin dari keterangan yang saling bertentangan ini adalah bahwa Syam dalam pengadilan Sudisman seringkali lupa atau tidak tahu dengan tepat kapan tanggal pengambilan keputusan untuk membunuh para jenderal. Ini misalnya tercermin saat dia mengatakan bahwa keputusan untuk membunuh para jenderal itu dibuat pada tanggal 29 September. Tanggal yang disebut ini memang mungkin para pemimpin gerakan membahas kemungkinan perlawanan beberapa jenderal saat ditangkap dan juga resiko yang harus ditanggung jika pembunuhan terpaksa dilakukan. Tapi jika ini yang terjadi tampaknya keputusan yang diambil terlalu cepat biarpun berisiko. Sebenarnya adalah penting untuk memberikan perintah itu dalam bentuk ungkapan yang jelas, karena perintah itu diturunkan dari pimpinan kepada bawahan. Meskipun para pimpinan gerakan itu bisa saja memberikan perintah secara halus dengan ungkapan “amankan para jenderal itu,”⁴⁴ orang yang bertugas menjemput para jenderal harus mengetahui

⁴¹Kesaksian Gatot Sukrisno pada pengadilan Untung. *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁴²Kesaksian Sujono pada pengadilan Untung. *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁴³Syam pada persidangan Syam.

⁴⁴Merujuk persekongkolan di tahap awal, Ben Anderson mencatat bahwa “perlu dipahami dalam komunikasi sosial, orang Jawa terhadap banyak hal, biasanya tidak dikatakan tapi dipendam. Dan kebanyakan komunikasinya lebih mengandalkan pada pemahaman intuitif yang didasarkan pada saling kepercayaan yang kuat. Pola ini meskipun mengasah kepekaan yang halus, seringkali cenderung membingungkan dan membuat salah tafsir.” Benedict R. Anderson, *Java in a Time of Revolution* (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 396.

secara tepat apa yang harus dilakukan di saat keadaan sukar. Jadi Untung memerintahkan Dul Arief dengan meyakinkan supaya "jangan ada seorang jendral pun yang lolos," sementara Dul Arief dengan sembrono mengatakan kepada pasukannya "tangkap mereka hidup atau mati." Namun nampaknya tak ada seorang pun anggota gerakan berharap hingga sebanyak tiga jendral termasuk Yani benar-benar akhirnya mati ketika mereka sampai ke Lubang Buaya. Ketidakjelasan perintah ini menjelaskan kepanikan yang terjadi pada Gatot Sukrisno dan Dul Arief sebagai komandan pasukan yang bertanggungjawab terhadap terbunuhnya tiga jendral. Waktu itu, ketika Dul Arief meminta Gatot untuk membunuh tiga jendral lainnya yang masih hidup, yang ini mungkin biar tanggung jawabnya bisa ditanggung bersama. Gatot tidak segera melakukan eksekusi tetapi melaporkan ke pemimpin gerakan lainnya. Saat pesannya sampai, para pemimpin gerakan nampaknya memutuskan bahwa dalam posisinya yang demikian itu bagi mereka sekarang sudah kepalang tanggung setelah tiga jendral itu dibunuh. Sangat mungkin mereka mulai menjadi panik mendengar Nasution lolos meski Yani telah terbunuh.

Apa yang mungkin terjadi jika usaha coup itu terlaksana sesuai dengan rencana? Seandainya para jendral —termasuk Nasution— semuanya tertangkap dan diadili berkaitan dengan rencana berkomplot menentang presiden, maka masuk akal meyakini bahwa presiden akan menyokong aksi yang dilakukan gerakan.

Dengan dukungan presiden ini akan sangat sukar bagi pemimpin Angkatan Darat yang ada untuk bergerak melawan para perwira pemberontak. Banyak kemungkinan situasi dan persoalan ini akan ditanggapi dengan musyawarah —suatu pola penyelesaian masalah yang sering dipakai— yang mengarah pada kompromi, di mana kompromi ini akan melemahkan posisi pimpinan Angkatan Darat yang dianggap sudah bejat (*hawks*) yang mungkin saja mengakibatkan berubah ke arah sebaliknya dari pandangan mereka yang selama ini secara prinsip anti komunis. Mungkin juga Soekarno akan mendesak ke arah pencopotan Yani dan kawan-kawannya. Namun tidaklah mungkin Soekarno akan bisa mendesak panglima yang pro komunis di jajaran Angkatan Darat. Bentuk tawaran ini mungkin sekali tidak bisa diterima oleh banyak perwira senior waktu itu seperti Soeharto (Kostrad), Umar Wirahadikusumah (Kodam Jaya), Ajie (Kodam Jawa Barat), Basuki Rahmat (Kodam Jawa Timur) dan Makoginta (Sumatera); karena perwira-perwira —yang memiliki kekuasaan mengatur pasukan— ini dikenal sangat anti komunis. Dengan demikian "Peristiwa 30 September" pada kenyataannya bukan lebih banyak mengarah pada satu "coup" terhadap pemerintah yang berkuasa, akan tetapi lebih merupakan upaya-upaya menekan kendali Soekarno di dalam struktur pemerintahan yang ada.

Dalam paper ini saya telah menganalisa bahwa kesaksian yang muncul

pada pengadilan Mahmillub terbuka untuk lebih banyak interpretasi. Walau nampak cukup kuat bukti-bukti pengadilan menyatakan bahwa pimpinan PKI memang sungguh-sungguh terlibat secara mendalam dalam usaha-usaha coup, kesimpulan umum atas dasar-dasar bukti itu sendiri yang menyangkut sifat dan motif di balik keterlibatan PKI tetaplah nampak terbuka untuk dipersoalkan. Bukti-bukti pengadilan, pada kenyataannya, justru menyatakan bahwa sangat mungkin ide membersihkan pemimpin puncak Angkatan Darat datang dari perwira menengah di Divisi Diponegoro dan kolega-kolega mereka di Jakarta. Tuduhan Angkatan Darat bahwa itu berasal dari PKI melalui Syam yang memrakarsai gerakan tidak terbukti di dalam pengadilan-pengadilan itu. Keterlibatan PKI berawal hanyalah saat Aidit menjadi yakin akan perlunya keseimbangan secara perlahan pada konfigurasi politik di Jakarta yang mulai berbahaya dan berencana menurunkan presiden. Walau Syam mungkin memainkan peranan dalam merancang rencana-rencana gerakan yang di Jakarta, bukti-bukti di pengadilan tidak banyak menunjukkan bahwa pengaruh PKI sangat besar di Jawa Tengah. Karenanya, tujuan pokok gerakan adalah menangkap para jenderal yang diyakini tengah berkomplot merencanakan penentangan terhadap presiden. Hal itu dilakukan dengan harapan agar presiden dapat mengambil tindakan terhadap para jenderal tersebut. ❖

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict R., dan Mc Vey, Ruth T. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

Bass, Jerome R. "The PKI and the Attempted Coup", *Journal of Southeast Asian Studies*, No. 1, Maret 1970.

Brackman, Arnold. *The Communist Collapse in Indonesia*, New York: W. W. Norton & Co., 1969.

_____. *Indonesia: The Gestapu Affair*. New York: The American Asian Educational Exchange Inc., 1969.

Bunnell, Frederick. "Indonesia's Quasi-Military Regime", *Current History*, Vol. LII, Januari 1967.

Dommen, Arthur. "The Attempted Coup in Indonesia", *The China Quarterly*, Januari - Maret 1966.

Hindley, Donald. "Political Power and the October 1965 Coup in Indonesia", *Journal of Asian Studies*, Vol. XXVI, No. 2, Februari 1967.

_____. "Indonesian Politics, 1965-67: The September 30 Movement and the Fall of Sukarno", *The World Today*, Vol. 24, No. 8, August 1968.

_____. "Aliran and the Fall of the Old Order", *Indonesia*, No. 9, April 1970.

Howie, R. P. L. "China and the Gestapu Affair in Indonesia: Accomplice or Scapegoat?" Makalah yang pernah disampaikan pada Konferensi Asosiasi Australia untuk studi Politik, Agustus 1970.

Hughes, John. *Indonesia Upheaval*, New York: David McKay Co., Inc., 1967.

Lev, Daniel S. "Indonesia 1965: The Year of the Coup", *Asian Survey*, Vol. VI, No. 2, Februari 1966.

McVey, Ruth T. "Indonesian Communism and China" in Tang Tsou (ed.), *China in Crises*, Vol. II. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

Mortimer, Rex. "Unresolved Problems of the Indonesian Coup", *Australian Outlook*, Vol. XXV, No. 1 April 1971.

Notosusanto, Nugroho dan Saleh, Ismail. *The Coup Attempt of the 'September 30 Movement' in*

Indonesia. Djakarta: Pembimbing Masa, 1968.

Paget, Roger K. "The Military in Indonesian Politics: The Burden of Power", *Pacific Affairs*, Vol. XL, Nos. 3-4, Fall-Winter 1967-68.

Palmier, Leslie. "The 30th September Movement in Indonesia", *Modern Asian Studies*, Vol. V, Part 1, Januari 1971.

Pauker, Guy J. *The Rise and Fall of the Communist Party in Indonesia*. Santa Monica: The RAND Corporation, 1969.

_____. "The Gestapu Affair of 1965," *Southeast Asia*, Vol. I, No. 1, Winter 1971.

Polomka, Peter. "The Indonesian Army and Confrontation." M.A Thesis, Melbourne University, 1969.

Ra'anan, Uri. "Indonesia 1965" in W. G. Andrews and Uri Ra'anan (eds.), *The Politics of Coup D'etat*. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1969.

Rey, Lucian. "Dossier of the Indonesian Drama", *New Left Review*, No. 36 Maret-April 1966.

Sutter, John O. "Two Faces of Konfrontasi:

'Crush Malaysia' and the Gestapu", *Asian Survey*, Vol. VI, No. 10, Oktober 1966.

Van der Kroef, Justus M. *Indonesia Since Sukarno*. Singapore: Asia Pacific Press, 1971.

_____. "Gestapu in Indonesia", *Orbis*, Vol. IX, No. 2, Summer 1966.

_____. "Indonesian Communism Since the 1965 Coup", *Pacific Affairs*, Vol. XLIII, No. 1, Spring 1970.

Van Langenburg, Michael. "The September 30th Movement: The Contradictions." B.A. Honours Thesis, Sydney University, 1967.

Vittachi, Tarzie. *The Fall of Soekarno*. New York: Deutsch, 1967.

Weatherbee, Donald E. "Interpretations of Gestapu, the 1965 Indonesian Coup", *World Affairs*, Vol. 132, Maret 1970.

Wertheim, W. F. "Indonesia Before and After the Untung Coup", *Pacific Affairs*, Vol. XXXIX, Nos. 1-2, Spring-Summer 1966.

_____. "Suharto and the Untung Coup—The Missing Link", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 1, No. 2, Winter 1970.